

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komoditas hortikultura, khususnya sawi, memainkan peran penting dalam sektor pertanian Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga mencakup fungsinya sebagai pendorong diversifikasi ekonomi pedesaan dan pilar keamanan pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS (2023), produksi nasional sawi dan kubis Cina telah melebihi 6,8 juta kuintal, dengan Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai salah satu pusat produksi utama yang berkontribusi sekitar 20 hingga 25 persen dari total produksi nasional. Angka ini menegaskan posisi strategis sayur sawi dalam sistem pangan nasional dan mencerminkan ketergantungan tinggi masyarakat pada komoditas sayuran daun ini. Namun, volume produksi yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan petani di tingkat akar rumput, sehingga terdapat ketimpangan yang jelas antara pencapaian produksi makro dan kondisi ekonomi nyata yang dihadapi petani di lapangan.

Situasi ini jelas terlihat di Desa Malasari, sebuah wilayah di mana perekonomian rumah tangga bergantung secara utama pada budidaya sawi. Sebagian besar petani di wilayah ini mengelola lahan kecil, umumnya kurang dari 0,5 hektar per unit usaha. Skala usaha yang kecil ini membuat mereka rentan terhadap berbagai tekanan struktural, seperti keterbatasan modal untuk fasilitas produksi berkualitas, akses minim terhadap teknologi pertanian modern, dan kurangnya informasi pasar yang

akurat. Situasi ini seringkali menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang stagnan, diperparah oleh ketidakstabilan harga, variabilitas iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan, serta ketergantungan pada perantara Marito (2023). Ketika akses ke lembaga keuangan formal terbatas, petani sering beralih ke pembiayaan informal yang mengikat mereka pada saluran pemasaran tertentu, sehingga semakin melemahkan posisi tawar mereka dalam menentukan harga jual.

Sebagai respons terhadap tantangan struktural ini, berbagai inisiatif kemitraan antara petani dan pelaku agribisnis telah dipromosikan oleh baik pemerintah maupun sektor swasta. Secara teori, kemitraan ini diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap sumber daya keuangan, teknologi, dan jaringan pasar yang lebih luas guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas Yuliati (2020). Susanto et al (2023) secara empiris membuktikan bahwa kolaborasi dalam rantai pasok sayuran segar memiliki korelasi positif dengan kinerja distribusi dan efisiensi nilai tambah temuan yang sangat relevan mengingat daun mustard adalah komoditas yang mudah busuk dan sangat bergantung pada distribusi yang lancar. Di Desa Malasari, skema kemitraan mencakup hubungan dengan pengumpul lokal hingga perusahaan distribusi regional. Namun, pertanyaan mengenai sejauh mana kemitraan ini benar-benar memberikan manfaat proporsional bagi petani kecil telah diangkat dalam beberapa studi terbaru Utami et al (2024)

Fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh dari harapan normatif tersebut. Meskipun skema kemitraan telah lama dipromosikan sebagai alat pemberdayaan, sebagian besar petani mustard di Desa Malasari tetap berada dalam posisi rentan dengan penghasilan yang tidak stabil. Ketergantungan pada perantara

belum berkurang secara signifikan, dan akses terhadap teknologi serta pasar yang lebih luas tetap terbatas. Jarak antara idealisme normatif kemitraan peningkatan kesejahteraan dan keadilan distribusi dan kondisi nyata yang dihadapi petani mustard tetap lebar. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memahami mengapa kemitraan yang secara normatif dirancang untuk memberikan manfaat tidak selalu menghasilkan perubahan nyata bagi petani, serta faktor sosial apa yang pada akhirnya menentukan keberlanjutan hubungan ini dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Malasari pada bulan Maret 2026, ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kemitraan antara petani sawi dan mitra usaha. Permasalahan pertama yang teridentifikasi adalah ketidakseimbangan manfaat ekonomi yang diterima petani dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan. Petani menanggung seluruh biaya produksi mulai dari pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, pestisida, hingga biaya panen dan pengangkutan, namun mereka tidak memiliki kepastian harga jual yang menguntungkan. Harga sawi ditentukan oleh mitra usaha berdasarkan kondisi pasar induk yang tidak selalu transparan kepada petani. Akibatnya, ketika harga pasar sedang rendah, petani tetap harus menjual hasil panennya kepada mitra usaha dengan harga yang telah ditentukan, tanpa memiliki alternatif pemasaran yang lebih menguntungkan.

Permasalahan kedua adalah asimetri informasi yang signifikan antara petani dan mitra usaha. Petani tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi harga pasar induk, sehingga mereka tidak dapat menilai apakah harga yang ditawarkan mitra

usaha sudah sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Ketidakmampuan petani dalam mengakses informasi pasar ini diperparah oleh terbatasnya pemahaman mereka terhadap klausul-klausul dalam perjanjian kemitraan yang umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis yang mengikat secara hukum. Kondisi ini menempatkan petani pada posisi tawar yang sangat lemah dan membuat mereka sangat bergantung pada itikad baik mitra usaha.

Permasalahan ketiga adalah ketidakpastian produksi dan fluktuasi harga yang sangat mempengaruhi pendapatan petani. Sawi sebagai komoditas pertanian memiliki siklus tanam yang relatif singkat (sekitar 20-25 hari), namun sangat rentan terhadap serangan hama, penyakit, dan perubahan cuaca ekstrem. Ketika gagal panen, petani harus menanggung seluruh kerugian tanpa adanya mekanisme perlindungan atau kompensasi dari mitra usaha. Sebaliknya, ketika panen berlimpah, harga sawi justru cenderung turun karena melimpahnya pasokan, sehingga pendapatan petani tidak meningkat secara proporsional dengan volume produksi yang dihasilkan.

Permasalahan keempat adalah rendahnya tingkat kepercayaan dan komitmen dalam hubungan kemitraan yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak. Beberapa petani mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan informasi yang jujur mengenai harga pasar dan potongan-potongan biaya yang dibebankan. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam kerja sama dan mengancam keberlanjutan kemitraan dalam jangka panjang. Petani cenderung melanjutkan kemitraan bukan karena kepuasan

terhadap hubungan yang terjalin, melainkan karena keterbatasan alternatif pemasaran yang tersedia.

Permasalahan kelima adalah belum optimalnya peran kemitraan dalam meningkatkan kapasitas petani, baik dari aspek teknis budidaya maupun aspek manajerial. Petani tidak mendapatkan pendampingan teknis yang memadai dari mitra usaha terkait penggunaan teknologi pertanian modern, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, maupun praktik pascapanen yang baik. Akibatnya, produktivitas dan kualitas hasil panen petani cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu.

Adapun penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketimpangan struktural dalam rantai nilai agribisnis menyebabkan petani sebagai produsen skala kecil berada pada posisi yang paling lemah karena mereka hanya berperan sebagai pemasok bahan baku tanpa memiliki akses langsung ke pasar konsumen. Struktur pemasaran yang panjang dan melibatkan banyak perantara menyebabkan sebagian besar keuntungan dinikmati oleh aktor-aktor di tingkat distribusi dan ritel, sementara petani hanya menerima bagian yang sangat kecil dari nilai tambah yang dihasilkan.
2. Keterbatasan modal petani menjadi penyebab utama ketergantungan mereka pada mitra usaha. Karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan atau koperasi simpan pinjam, petani terpaksa menerima pinjaman modal dari mitra usaha dengan konsekuensi harus menjual hasil

panen secara eksklusif kepada mitra tersebut. Keterikatan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang di mana petani kehilangan kebebasan untuk memilih saluran pemasaran yang lebih menguntungkan.

3. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi petani menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses informasi, memahami hak dan kewajiban dalam kemitraan, serta melakukan negosiasi yang efektif. Sebagian besar petani di Desa Malasari hanya menamatkan pendidikan dasar, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara profesional dan mengakses sumber daya informasi masih sangat terbatas.
4. Lemahnya kelembagaan petani seperti kelompok tani atau koperasi yang belum berfungsi secara optimal dalam melindungi kepentingan anggota dan meningkatkan posisi tawar kolektif. Kelompok tani yang ada masih bersifat formalitas administratif dan belum memiliki program kerja yang nyata dalam pemberdayaan petani, pengelolaan pemasaran bersama, atau penguatan modal usaha.
5. Kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan regulasi kemitraan pertanian menyebabkan praktik-praktik kemitraan yang tidak adil dapat berlangsung terus-menerus tanpa adanya sanksi atau koreksi. Kebijakan yang ada masih bersifat makro dan belum menyentuh aspek perlindungan petani kecil dalam hubungan kemitraan yang asimetris.

Berdasarkan permasalahan dan penyebab yang telah diidentifikasi, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kemitraan antara petani dan mitra usaha

tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan ekonomi, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) yang dikembangkan oleh Homans (1958) dan Blau (2017) menawarkan kerangka analitis yang tepat untuk memahami dinamika hubungan kemitraan melalui lima dimensi utama: peran kemitraan, reward (manfaat), cost (biaya), reciprocity (timbal balik), serta trust and commitment (kepercayaan dan komitmen). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tidak hanya aspek ekonomi dari kemitraan, tetapi juga faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi keputusan petani dalam mempertahankan atau mengakhiri hubungan kemitraan.

Berbagai studi menegaskan bahwa kesuksesan kemitraan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan institusional formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antara para pemangku kepentingan. Widadie et al (2023) menekankan bahwa komunikasi terbuka dan pertukaran informasi merupakan kunci keberlanjutan hubungan antara petani dan pembeli. Sejalan dengan hal ini, Ariadi et al (2024) menemukan bahwa aktivitas berbagi dan kolaborasi dalam rantai pasok hortikultura berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keberlanjutan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan, komitmen, dan prinsip timbal balik merupakan variabel krusial yang menentukan ketahanan hubungan kemitraan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, penerapan eksplisit Social Exchange Theory dalam penelitian kemitraan pertanian hortikultura di Indonesia masih sangat terbatas.

Sebagian besar studi yang menggunakan SET cenderung berfokus pada konteks industri manufaktur, hubungan pemasok-distributor skala besar, atau kemitraan berbasis platform digital Putra & Mitra (2025). Adaptasi teoretis SET untuk menjelaskan dinamika pertukaran dalam hubungan petani kecil yang ditandai oleh norma sosial lokal seperti gotong royong dan kepercayaan komunal masih merupakan bidang yang kurang dieksplorasi. Di sisi lain, sebagian besar studi kemitraan yang ada menempatkan kinerja ekonomi sebagai variabel output utama, sementara dimensi sosiopsikologis yang mendasari keputusan petani untuk mempertahankan kemitraan justru sering diabaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PERAN KEMITRAAN PETANI SAWI MENGGUNAKAN *SOCIAL EXCHANGE THEORY* (STUDI KASUS DI DESA MALASARI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kemitraan petani sawi dari perspektif pertukaran sosial, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik kemitraan agribisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memusatkan perhatian pada peran kemitraan petani sawi di Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, khususnya dalam menganalisis dinamika hubungan antara petani dan mitra usaha dengan menggunakan pendekatan Social Exchange Theory (SET). Fokus utama penelitian diarahkan pada

lima dimensi utama SET, yaitu peran kemitraan, reward (manfaat), cost (biaya dan risiko), reciprocity (timbal balik), serta trust and commitment (kepercayaan dan komitmen). Selain itu, penelitian ini juga memusatkan perhatian pada berbagai hambatan yang dihadapi petani dalam menjalankan kemitraan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi hambatan tersebut dalam rangka menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan

1.3 Perumusan Masalah

Fokus penelitian dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang spesifik dan terfokus, guna mengarahkan analisis terhadap aspek-aspek kemitraan petani sawi di Desa Malasari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana gambaran umum kemitraan petani sawi di Desa Malasari?
- 1.2.2 Bagaimana analisis penerapan konsep *social exchange theory* diantara petani dan mitra usaha di Desa Malasari?
- 1.2.3 Apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kemitraan, dan usaha mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kemitraan dari aspek *social exchange theory* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam mengenai kemitraan di Desa Malasari melalui analisis yang sistematis. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1 Mengetahui gambaran umum kemitraan petani sawi di Desa Malasari

1.3.2 Menganalisis penerapan konsep *social exchange theory* diantara petani sawi dan mitra usaha di Desa Malasari

1.3.3 Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kemitraan, dan usaha mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kemitraan dari aspek *social exchange theory*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini meliputi :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis dari penelitian ini mencakup pengayaan bidang pertanian dan kolaborasi agribisnis, khususnya melalui penerapan Teori Pertukaran Sosial (*Social exchange theory*) pada pola kemitraan petani di daerah pedesaan. Dengan mengintegrasikan teori ini, penelitian ini membantu mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana interaksi timbal balik antara petani dan mitra dapat membentuk struktur sosial yang lebih kuat, seperti melalui analisis dinamika kepercayaan dan keseimbangan manfaat. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan akademik tentang mekanisme sosial di sektor pertanian, tetapi juga mendorong model pengembangan teoritis baru yang dapat diterapkan pada konteks global, sehingga memperkaya literatur dengan perspektif praktis dari dunia nyata.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem kemitraan agribisnis di wilayah pedesaan.

1) Bagi petani

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memahami hak dan kewajiban dalam relasi kemitraan, sehingga petani mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan strategis dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani serta mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2) Bagi pelaku usaha

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam merancang skema kemitraan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, sehingga keberlanjutan rantai pasokan pertanian dapat terjaga secara optimal. Ketiga, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan regulasi dan program pemberdayaan petani yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam konteks penguatan kelembagaan pertanian di tingkat lokal.

3) Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan program pelatihan dan pendampingan yang berbasis pada dinamika sosial dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola kemitraan pertanian yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.6 Lokasi dan Lamanya Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kawasan pertanian sawi yang beralamatkan Kp Ciseupan Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40374

1.6.2 Lamanya Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Maret 2026 hingga Agustus 2026, yang meliputi tahap persiapan berupa penjajakan, studi kepustakaan, pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian, serta pelaksanaan seminar usulan penelitian.

